

# Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005

Kurnia Jayanti<sup>1</sup>

## **Abstrak**

*Tulisan ini menganalisis konflik vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintahan pusat pada masa orde baru hingga masa reformasi (1976-2005). Skripsi ini menjawab beberapa pertanyaan berikut: bagaimana sejarah Gerakan Aceh Merdeka terbentuk? bagaimana perjalanan konflik Vertikal di Aceh yang dilalui GAM? faktor apa saja yang menyebabkan rakyat Aceh yang ingin melepaskan diri dari Indonesia? upaya apa yang di lakukan untuk penyelesaian konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia dalam meraih rancangan kesepakatan damai? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan. Adapun teknis penulisan skripsi ini termasuk tata cara membuat catatan kaki, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) CeQDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

**Kata kunci:** Konflik vertikal, Gerakan Aceh Merdeka, Pemerintah Pusat Indonesia

## **Abstract**

*This thesis analyzes the vertical conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the central government in the new order until the reform periode (1975-2005). This thesis to answer the following question: how the history of the Free Aceh Movement formed? How to travel vertical conflict in Aceh GAM passed? What factors are causing the people of Aceh who want to break away from Indonesia? What effortss will be undertaken to resolve the conflict betqween the Free Aceh Movement and the Indonesian government in achieving the draft peace agreement? To answer some of these questions, the autors conducted a study of literature. As for technical writing (thesis and dissertation) CEQDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

**Keywords:** vertical conflict, the people of Aceh movement, Indonesian center government

---

<sup>1</sup> Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

## A. Pendahuluan

Konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh merupakan ketidakadilan: tidak sesuai antara kenyataan dengan pengharapan di berbagai bidang khususnya bidang pembangunan. Ini berdampak pada kemiskinan, kebodohan, dan tingkat

keselamatan masyarakat yang rendah. Konflik ini muncul sejak diproklamirkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di Pidie oleh GAM yang dipelopori oleh Muhammad Hasan Tiro. Demikianlah GAM lahir karena nasionalisme etnis Aceh bangkit sebagai jawaban terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik<sup>2</sup>. GAM dikenal dengan nama ASNLF (*Aceh Sumatra National Liberation Front*). ASNLF selalu digunakan bila berhubungan dengan dunia International. Pemerintah pusat menjalankan berbagai operasi baik secara politik maupun militeristik untuk menumpas gerakan ini.<sup>3</sup>

Secara geografis, Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari 9 kabupaten, 2 kotamadya, 3 kotip, 142 kecamatan, 591 mukim dan 5.463 desa. Luas wilayahnya adalah 57.365,57 km meliputi 119 pulau, 35 gunung, 73 sungai.<sup>4</sup>

Dahulu Aceh merupakan satu-satunya daerah di Sumatra yang memiliki nilai politis di mata orang-orang Barat sehingga daerah ini pantas menjadi subjek sejarah umum.<sup>5</sup> Aceh dengan latar

belakang budaya dan historis keagamaan namun atas dasar paham nasionalisme para pendiri bangsa, tuntutan rakyat Aceh tidak terkabulkan. Hal ini yang memunculkan rasa kekecewaan yang sangat mendalam bagi rakyat Aceh. Kekecewaan ini muncul karena ada alasan yang sangat fundamental, yaitu, dalam proses menuju kemerdekaan, peran rakyat Aceh sangatlah besar dengan berbagai pemberontakan menentang kedaulatan negara yang baru berdiri, yaitu dalam wadah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) oleh Daud Beureuh.<sup>6</sup>

Permasalahan yang di hadapi antara GAM dengan pemerintahan pusat sangat kompleks terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dikarenakan kelanjutan dari DI/TII di Aceh yang belum usai, yang kemudian memunculkan permasalahan baru yaitu GAM. Salah satu yang belum selesai antara lain GAM yang ingin merdeka atau melepaskan wilayah Aceh dari Indonesia, Sentimen etnis dalam konflik (dikotomi Aceh dan Jawa). Selain itu pemerintahan pusat juga mengiginkan Aceh tetap dalam wilayah Indonesia.<sup>7</sup>

Munculnya GAM secara diam-diam dikarenakan ketidaksiapan pihak GAM untuk langsung berhadapan dengan pihak penguasa, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. GAM terungkap karena ada beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Aceh dikirim surat berisikan kewajiban mereka membayar pajak kepada GAM, akan tetapi perusahaan-perusahaan tersebut tidak memberikan dana seperti yang di inginkan GAM. Dengan demikian, keberadaan dan aktifitas gerakan ini mulai diketahui oleh pemerintah pusat bahwa ada gerakan

<sup>2</sup> Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 70.

<sup>3</sup> Tabloid Suara Islam Edisi 53, 24 Oktober-6 Nopember 2008 M/24 Syawwal-7 Dzulq'adah 1429 H.

<sup>4</sup> Riza Sihbudi dkk, *Bara dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*, ( Jakarta: Mizan, 2001), h. 31.

<sup>5</sup> Marsden Wiliam, *History of Sumatra (Sejarah Sumatra)*, Pengantar John Bastin, Terjemah Tim Komunitas Bambu, ( Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), h. 365.

<sup>6</sup> Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, (Jakarta: LIPI, h. 10.

<sup>7</sup> Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 70.

bawah tanah yang memproklamasikan kemerdekaan di Aceh.<sup>8</sup>

Gagasan-gagasan Hasan Tiro semakin memuncak setelah pemerintahan Orde Baru yang mengeksploitasi gas alam dan minyak bumi di Aceh Utara sejak awal 1970-an. Hasan Tiro memunculkan dirinya sebagai “Duta Besar Republik Indonesia Islam Aceh”. Sejak saat itu, ia ikut berdiplomasi di luar negeri, terutama di New York untuk memasukan agenda-agenda tentang Aceh dalam forum internasional PBB. Salah satu puncaknya adalah ketika ia mencetuskan GAM pada tahun 1976.<sup>9</sup>

GAM yang di pimpin Hasan Tiro di kenal oleh rakyat Aceh Sebagai Wali Negara Aceh Merdeka menyatakan, bahwa ideologi yang di pilihnya bukan Islam serta orientasi politiknya bukan pendirian negara Islam sebagaimana pendahulunya lakukan. GAM adalah simbolisasi dan institusionalisasi dari identitas politik ini. Akibatnya, Aceh yang tadinya hanya sekedar etnis dan kartografis telah bertransformasi menjadi identitas politik. Gerakan Aceh Merdeka didukung oleh tiga kelompok masyarakat Aceh, yaitu golongan intelektual dan golongan profesional, golongan ulama serta golongan rakyat biasa.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya kemudian GAM telah melalui tiga fase penting, yaitu fase pertama, 1976-1989, GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya di dominasi dari kaum terpelajar dan GAM menjadi gerakan bawah tanah. Fase kedua, 1989-1998, fase ini lebih di kenal oleh rakyat Aceh sebagai era Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) Operasi ini kemudian memuluskan jalan bagi operasi bersenjata di Aceh. Fase

ketiga , pasca 1998, dalam fase ini, pemerintah pusat masih tetap menggunakan kekerasan, negara dalam menghadapi GAM maupun rakyat Aceh yang di dalam dirinya sudah mulai tumbuh semangat nasionalisme keAcehan.<sup>11</sup>

Dari operasi inilah kemudian muncul berbagai pelanggaran HAM berat dan menyisakan rasa sakit yang mendalam di negeri yang tidak pernah menuai rasa aman itu. Dalam bidang politik, kebijakan pemerintah yang sentralistik tampak dalam penentuan gubernur atau bupati. Strategi ini diterapkan oleh pemerintah pusat untuk menjamin agar pemerintah Aceh, khususnya gubernur berada langsung di bawah kendali pusat. Kebijakan sentralistik yang tidak memperdulikan kultur lokal sangat di rasakan dalam pemberlakuan UU No.5/1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan daerah dan UU No. 5/1979 tentang pokok-pokok Pemerintahan Desa. Dengan kedua Undang-undang tersebut, kekhasan sosio-kultural Aceh tereliminasi dan Pemberlakuan Undang-undang tersebut telah menyebabkan rusaknya struktur pemerintahan tradisional dan sistem budaya Aceh. Pemberlakuan Undang-undang tersebut merekayasa lahirnya elit baru yaitu elit birokratis yang ternyata tidak berakar dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Kondisi Aceh pada saat itu sangat dilematis yang di sebabkan oleh kompetisi yang memilukan antara GAM dan pemerintahan pusat. Posisi dilematis ini menunjukkan dengan didudukannya posisi rakyat pada dua posisi yang harus di bayar mahal oleh rakyat. Disatu sisi rakyat harus membantu baik dari segi finansial maupun material serta fisikal kepada pihak GAM, namun disisi lain, jika rakyat berpihak kepada pemerintahan pusat, maka akan di

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup>Isma Sawitri, Amran Zamzami, dkk., (Panitia Peduli Aceh), *Simak dan Selamatkan Aceh*, (Jakarta : PT Bina Rena Perwira, 1998), h. 15.

<sup>10</sup>Julien Benda, *Pengkhianatan Kaum Intelektual*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 25-26.

<sup>11</sup>Otto Syamsudin Ishak, *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*, (Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2008), h. 64.

<sup>12</sup>Tim Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion 1989-1992*, (New York: Cornell University Press, 1995), h. 1.

jadikan sasaran pembunuhan dan penganiayaan. Oleh karena itu, di perlukan sebuah solusi yang terbaik dengan tidak mengorbankan rakyat Aceh untuk kesekian kalinya.<sup>13</sup>

Akibat konflik dari tahun ke tahun menyebabkan masyarakat yang beralih profesi dari petani menjadi pedagang, peternak atau penarik becak. Melihat kondisi yang seperti ini menyebabkan kekecewaan bagi masyarakat karena mereka harus beradaptasi dengan pekerjaan baru mereka. Dalam bekerja mereka selalu diawasi oleh milisi TNI yang menyebabkan warga tidak berani untuk berbicara dan ruang gerak mereka menjadi terbatas.<sup>14</sup>

Rekonsiliasi merupakan langkah alternatif yang diambil dalam menghadapi banyaknya pertikaian seperti di daerah Aceh ini. Dalam kerangka penyelesaian masalah Aceh di masa Orde Baru pemerintah pusat seringkali melakukan kebijakan militeristik yang represif, namun setelah masa reformasi pemerintah pusat mencoba menyelesaikan masalah ini dengan upaya dialog yang membuahkan hasil pada masa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan wakil Presiden dalam menangani konflik ini. Oleh karenanya kearifan dan kerendahan hati para pemimpin sebagaimana yang ditunjukkan oleh Muhammad Jusuf Kalla menjadi penting dan menentukan bagi terwujudnya proses perdamaian di Aceh.<sup>15</sup>

Untuk itu penulis berusaha mengkaji Konflik Vertikal di Aceh dan hanya terfokus kepada Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintahan Pusat.

Dengan ini penulis mengajukannya sebagai karya ilmiah skripsi ini dengan judul **“Konflik Vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta Sejak Tahun 1976 sampai 2005”**.

### Tujuan penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan Peran GAM dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Dalam skripsi ini penulis mengambil studi Konflik Vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta dari tahun 1976-2005. Bagaimana pemerintah Pusat dan Daerah mengatur hubungan tersebut baik dalam hal politik maupun ekonomi yang orientasinya adalah terciptanya kestabilan dan integrasi politik dan ekonomi di Indonesia. Masa yang di ambil adalah sejak tahun 1976-2005 dimana merupakan akhir dari konflik ini.

### Metode Penelitian

Adapun metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yang dalam hal ini penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan sejarah Konflik Vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintahan Pusat serta menganalisis data serta fakta guna mendapatkan implikasi atas berbagai macam tindakan atau usaha pertahanan kelompok GAM terhadap peristiwa yang menjadi objek kajian. Metode ini dapat di gunakan karena dapat di temukan sumber-sumber yang tertulis. Walaupun terdapat hambatan di dalam mengumpulkan data dan informasi baik primer maupun skunder.

Tekhnik pengumpulan data yang penulis pilih adalah Library Research (studi kepustakaan) yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menelaah buku, jurnal, majalah, serta

<sup>13</sup>Daniel Dhakidae, *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses penyelesaian Konflik Aceh Jakarta Papua*, (Jakarta: YAPPIKA, 2001), h. 61.

<sup>14</sup>Daniel Dhakidae, *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses penyelesaian Konflik Aceh Jakarta Papua*, h.62.

<sup>15</sup>*Aceh Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, (Jakarta: Kontras, 2006), h. 154.

artikel yang berkaitan dengan Konflik Vertikal di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintahan Pusat 1976-2005). Data yang telah terhimpun di analisa melalui pendekatan sosial histories, yaitu pendekatan terhadap setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan suatu komunitas atau kelompok yang mencakup aspek profesional dan juga struktural sehingga dengan pendekatan ini akan di hasilkan data-data yang akurat mengenai Konflik Vertikal di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintahan Pusat 1976-2005).

Tekhnik penulisan pada skripsi ini merujuk pada buku: *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan metodologi penelitian. Konsekwensi logis di dalam metode penelitian sejarah, bahwa sumber tersebut di uji keaslian dan kesahihannya melalui kritik ekstern dan kritik intern. Setelah pengujian dan analisis data di lakukan maka fakta-fakta yang di peroleh dan di sintesiskan melalui eksplanasi sejarah. Penulisan sebagai tahap akhir dari prosedur penelitian sejarah ini di usahakan dengan selalu memperhatikan aspek kronologis. Sedangkan penyajiannya berdasarkan tema-tema penting dari setiap perkembangan objek penelitian.<sup>16</sup>

## B. Pembahasan

### Sejarah Gerakan Aceh Merdeka

#### Sejarah dan Tujuan Dibentuknya Gerakan Aceh Merdeka

Gerakan Aceh Merdeka pada mulanya merupakan sebuah gerakan yang tumbuh di sekitar lokasi industri, tepatnya di bukit Chokan Pidie, yang di pelopori oleh seorang intelektual Aceh yang lama

tinggal di Amerika Serikat, yaitu Muhammad Hasan Tiro.<sup>17</sup> Pada tahun 1950-an Hasan Tiro pernah bekerja pada kantor perwakilan Indonesia di perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1954, beliau menggabungkan diri secara terang-terangan ke dalam Darul Islam atau disebut dengan DI/TII pimpinan Daud Beureueh. Beliau mengangkat dirinya sebagai duta besar DI/TII di PBB.<sup>18</sup>

Sekitar tahun 1974-1975, Hasan Tiro berada di Pidie untuk mulai mensosialisasikan idenya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk berdirinya Gerakan Aceh Merdeka dan pada tahun 1976 Hasan Tiro semakin memantapkan rencananya untuk membuat gerakan bagi kemerdekaan Aceh namun Hasan Tiro tidak lagi menempatkan ideologi Islam sebagai misi utama, akan tetapi beliau mengusung tema nasionalisme dan patriotisme Aceh. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Hasan Tiro segera menghubungi para ulama dan intelektual lainnya untuk mendukung rencananya. Karena keterbatasan beliau mensosialisasikan rencananya terhadap para ulama dan intelektual Aceh lainnya, menyebabkan hanya sedikit para ulama dan intelektual Aceh yang dapat di tarik untuk bergabung dengan GAM.<sup>19</sup>

Pada tanggal 4 Desember 1976 tepatnya di bukit Chokan, pedalaman kecamatan Tiro, kabupaten Pidie, Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai hari lahir GAM,<sup>20</sup> Munculnya GAM adalah akibat kebijakan pemerintah pusat dengan ABRI/TNI

<sup>16</sup> Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI PRESS, 2006), h. 103.

<sup>17</sup>*Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 70-71 dan Zentgraaff, *Aceh*, (Jakarta: Depdikbud, 1983), h. 16.

<sup>18</sup>*Editor*, No. 43/ Thn IV/ 13 Juli 1991.

<sup>19</sup>*Editor*, No. 43/ Thn IV/ 13 Juli 1991.

<sup>20</sup>Hasan Muhammad di Tiro, *The Price of Freedom the Unfinished diary of Teungku Hasan Tiro*, *National Liberation Front of Aceh Sumatera*, 1984, h. 14.

sebagai penopang utama yang di anggap tidak adil terhadap rakyat Aceh dan gerakan ini dapat di pandang sebagai representasi kekecewaan dan kemarahan rakyat Aceh terhadap Indonesia pada masa Orde Baru. Pada mulanya gerakan ini lebih di kenal sebagai ASNLF (*Aceh Sumatra National Liberation Front*). Nama ini yang sering di gunakan dalam dokumen-dokumen resmi mereka, meskipun oleh TNI (pada waktu itu ABRI dan Pemerintah) mereka sering di sebut sebagai Gerakan Pengacau Liar (GPL).<sup>21</sup> Penggunaan nama ASNLF dan GAM ini, menurut keterangan dari Dr. Husaini Hasan tidak mengandung perbedaan, karena keduanya berintikan sama.<sup>22</sup>

Dalam doktrin pendirian GAM memiliki ideologi kemerdekaan nasional, yaitu: bertujuan membebaskan kontrol politik asing dari pemerintahan Indonesia. GAM merupakan pemberontakan orang Aceh jilid ke-dua yang memandang bahwa tergabungnya Aceh dalam NKRI merupakan tindakan ilegal<sup>23</sup>. Sesungguhnya faktor yang melatar belakangi mereka bergerak adalah karena posisi mereka terancam, baik dalam sektor ekonomi maupun politik, sebagai akibat kebijakan yang sentralistik pemerintah Republik Indonesia. Faktor pemicu utama adalah kelahiran birokrat dari Jawa yang menyingkirkan elit Aceh.<sup>24</sup>

Jumlah pengikut awal yang terlibat langsung dalam pemberontakan tersebut berjumlah kurang lebih dua ratus orang, yang mayoritas berasal dari Kabupaten

Pidie tempat kelahiran Hasan Tiro. Sehingga tidak heran jika dalam keanggotaan GAM tersebut banyak terdapat hubungan keluarga. Setidaknya ada dua hal yang menjadi sebab bagi seseorang menjadi anggota atau membantu GAM, pertama adalah rasa kecewa terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada di Aceh. Kedua adalah karena tekanan-tekanan yang di berikan oleh para pemberontak.<sup>25</sup>

seiring dengan perjalanan waktu, GAM yang semula berbasis di Aceh Pidie kemudian meluas ke daerah Aceh Utara dan Aceh Timur dengan menggunakan pamflet-pamflet. Isi dari pamflet-pamflet tersebut adalah ringkasan Hasan Tiro tentang Aceh yang telah tersebar dalam bentuk buku ataupun buletin. Di kedua daerah tersebut GAM menemukan momentumnya untuk melakukan sebuah gerakan terencana sejalan dengan munculnya berbagai ketimpangan sosial ekonomi terutama antara penduduk setempat dengan pendatang.<sup>26</sup>

Selama GAM berdiri, telah berhasil merekrut banyak pemuda Aceh menjadi Anggota, bahkan GAM disinyalir telah mampu mempengaruhi gerakan mahasiswa. Selain itu GAM berhasil membentuk beberapa LSM yang turut mendukung pemisahan Aceh dari Indonesia, salah satunya adalah SIRA (Sentra Informasi Referendum Aceh).<sup>27</sup> Perjuangan GAM sama halnya dengan SIRA, yang menanamkan visi kepada masyarakat agar setia dan berbagai lapisan sosial termotivasi berperan aktif dalam melakukan tindakan revolusioner. Perjuangan mereka mengangkat aspek

<sup>21</sup>*Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, (Jakarta : LIPI, 2003), h. 34.

<sup>22</sup>Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, h. 41.

<sup>23</sup>Mohammad Soleh Isre, ed., *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), h. 104.

<sup>24</sup>Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 142.

<sup>25</sup>Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*. h.72.

<sup>26</sup>Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, (Jakarta : LIPI, 2003), h. 42.

<sup>27</sup>Syamsul Hadi, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, h. 55.

historis dari kesenjangan sosial, ekonomi, dan ketidakstabilan yang di gunakan untuk melegitimasi gerakan yang dilakukan, di samping menimbulkan efek psikologis pada masyarakat untuk memberi dukungan terhadap perjuangan mereka. Karena Aceh tidak dapatkan imbalan seperti apa yang mereka inginkan dari pemerintahan pusat, maka perpecahanpun tidak dapat di hindari. Ada tiga startegi GAM dalam membangun kekuatan organisasinya. Pertama, memanfaatkan sikap represif pemerintah terhadap situasi Aceh. Kedua, melalui pembangunan jalur internasional. Dan yang ketiga, memanfaatkan perasaan takut dan khawatir para investor lokal maupun asing yang berdiam di Aceh.<sup>28</sup>

Bila hanya dilihat dari sisi pribadi Hasan Tiro, maka akan di temukan bahwa beliau melancarkan GAM setidaknya oleh tiga hal:

1. Keinginan untuk menunjukan eksistensi diri sebagai seorang yang menyandang gelar Tiro untuk menoreh namanya dalam sejarah seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya.
2. Karena ambisinya untuk menjadi pemimpin Aceh.
3. Karena rasa simpatinya melihat penderitaan rakyat Aceh. Selain karena alasan pribadi Hasan Tiro ada sebagian pihak yang menyebutkan bahwa GAM periode pertama disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Pertama, akibat penyelesaian masalah Darul Islam yang tidak tuntas. Kedua, akibat kekecewaan politik atas marginalisasi masyarakat Aceh dalam proses pembangunan di daerah industri minyak dan gas bumi di mana rakyat Aceh tidak di ikut sertakan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada mulanya persoalannya adalah masalahnya ekonomi dan politik, terutama perebutan sumber daya lokal. Namun, setelah itu baru persoalan ini digiring ke

ideologi sehingga muncullah gerakan etnoregional dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka.<sup>29</sup>

Jika di lihat yang terdapat dalam situs resminya tujuan GAM adalah untuk menjamin keberlangsungan Aceh sebagai sebuah bangsa, termasuk keberlangsungan dalam bidang politik, sosial, budaya dan warisan agama. Jika mengacu pada teks proklamasi Aceh Merdeka, baik berbahasa Inggris maupun berbahasa Aceh yang sudah di artikan ke dalam bahasa Indonesia yang berhasil di peroleh, cukup jelas menyatakan bahwa tujuan dari gerakan tersebut adalah untuk memerdekakan Aceh dari penjajahan bangsa Jawa.<sup>30</sup>

Merdeka disini mengandung dua makna, bagi para tokoh ulama GAM dan para pendukung aktif GAM, merdeka diartikan berdirinya Aceh sebagai sebuah negara yang terpisah dari pemerintah Indonesia. Sementara itu, bagi masyarakat desa yang menjadi pendukung GAM, bahwa bangsa Jawa di anggap sebagai penjajah karena di anggap telah mengambil hak mereka, baik hak ekonomi, politik, maupun sosial. Mereka ingin mengusir Jawa karena menganggap tidak di perlukan secara adil di tanahnya sendiri.<sup>31</sup>

## **Konflik Vertikal Gerakan Aceh Merdeka Dengan Pemerintah Pusat**

### **Sejarah Konflik Vertikal di Aceh**

Konflik yang terjadi di Aceh mempunyai akar sejarah yang panjang. Akar konflik tersebut berkaitan erat dengan relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan rakyat Aceh. Dari segi historis, akar permasalahan konflik Aceh

<sup>28</sup>Syarifuddin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: Cidencindo Pustaka, 2000), h. 70.

<sup>29</sup>Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, h. 48.

<sup>30</sup>Kristen E. Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of A Separatist Organizations*, (East West Center: Wasington,2004), h. 1.

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 2.

mengarah pada kekecewaan rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia, dalam hal kesenjangan persamaan, keadilan, penegakan hukum, dan kepemimpinan nasional, konflik ini timbul terutama karena ada rasa ketidakadilan.<sup>32</sup> Peristiwa ini di anggap sebagai bentuk diskriminasi sehingga terjadi kecemburuan sosial yang sangat mendalam bagi rakyat Aceh yang menyebabkan terjadinya perubahan serta gejolak sosial yang sangat meluas. Selain masalah kekecewaan pada pemerintah pusat, konflik di Aceh juga muncul akibat peminggiran identitas kultural masyarakat Aceh.<sup>33</sup>

Hubungan yang tidak harmonis dengan pemerintah pusat menjadi sebab dari rentetan konflik di Aceh. Mulai dari Presiden Soekarno Hingga Soeharto, tidak pernah sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi rakyat Aceh. Kekecewaan yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah itu akhirnya membuahkan perlawanan yang terkordinir dan mengakibatkan lahirnya gerakan perlawanan, maka munculah GAM.<sup>34</sup>

Mengenai hal ini seperti yang dilukiskan oleh Nazaruddin Syamsuddin yang mencatat tujuh tahap perkembangan peradaban Aceh yang mengarah pada "Penghancuran Kebudayaan". Setelah merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI yang di jalani secara monumental oleh masyarakat Aceh tahun 1945, kemudian disusul oleh Perang Cumbok tahun 1946 tatkala konflik fisik dan revolusi sosial berlangsung antara kaum Uleebalang (bangsawan) dan ulama. Disusul kemudian dengan peristiwa DI/TII sejak tahun 1953 sampai tahun 1963. Kemudian terjadi PKI dalam Gerakan 30 September 1965, Demikianlah tahap

pertama.<sup>35</sup> Tiga tahap selanjutnya justru terjadi pada masa Orde Baru. Seperti lahirnya GAM dan pemberlakuan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM), yakni sebagai tanggapan keras pemerintah pusat atas aksi GAM."<sup>36</sup>

Dalam perkembangannya kemudian GAM telah melalui tiga fase penting, yaitu fase pertama, 1976-1989, GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya di dominasi dari kaum terpelajar, operasi yang dilakukan untuk melawan GAM adalah didominasi oleh TNI-AD di bawah Kodam I/Bukit Barisan. Mereka yang di jadikan sebagai objek kejahatan kemanusiaan oleh negara, yakni mereka yang menyatakan dirinya sebagai pendukung GAM, dan pada akhir tahun 1979 pemerintah Indonesia berhasil menumpas gerakan ini. Sehingga, GAM menjadi gerakan bawah tanah.<sup>37</sup> Pada fase ini, operasi militer masih belum mendekonstruksi kesadaran berbangsa orang Aceh, namun mulai menciptakan embrio gerakan yang lebih radikal dan matang. Sehingga Pada kurun waktu 1976 sampai dengan 1989 untuk mendukung kampanye anti pemberontakan, tentara Indonesia melakukan pengejaran dan serangan bersenjata serta pencarian (*sweeping*) dari rumah ke rumah terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka, di daerah yang diduga sebagai basis GAM.<sup>38</sup>

Fase Kedua, 1989-1998. Fase yang lebih di kenal oleh rakyat Aceh sebagai era Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM), dimulai ketika pada tahun 1989 kaum gerilyawan GAM yang telah melalui pendidikan militer di Libya sejak tahun

<sup>32</sup>*Kompas*, 26 Agustus 2003.

<sup>33</sup>Syarifudin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: Cidencindo Pustaka, 2000), h. 48.

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 224.

<sup>35</sup>Rusdji Ali Muhammad; editor: Hasab Basri, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Jakarta: Logos, 2003), h. xi.

<sup>36</sup>A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. xix.

<sup>37</sup>Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, h. 24.

<sup>38</sup>Otto Syamsudin Ishak, *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*, h. 63.

1986 kemudian muncul kembali di Aceh dan di susul pula oleh konsolidasi struktur komando GAM di Aceh. Pemerintah Indonesia pada tahun 1990-an kemudian juga mengambil kebijakan yang sangat militeristik dengan menggelar operasi Jaring Merah dan memberikan status Daerah Operasi Militer (DOM).<sup>39</sup>

Pada masa DOM, pasukan yang ditugaskan ke wilayah Aceh yang bergolak adalah pasukan satuan organik sebanyak 12 kompi dari pangdam Bukit Barisan yang dibantu oleh satgas Inteligen (Kopassus). Pasukan yang di kirim untuk mengamankan wilayah yang bergolak tersebut, dalam perkembangannya mengalami penyimpangan dari apa yang seharusnya mereka lakukan dan pemberlakuan Daerah Operasi Militer untuk mengatasi GAM yang telah menelan banyak korban dan di warnai dengan banyak tindak kekerasan terhadap rakyat Aceh karena dalam menjalankan operasinya di Aceh, ternyata pasukan TNI bukan berusaha mencari simpati hati rakyat Aceh, sebaliknya mereka mempertontonkan berbagai arogansinya yang sangat menyakiti hati rakyat Aceh, seperti pengusiran penduduk dari desanya, pemukulan, pembunuhan hingga pemerkosaan.<sup>40</sup>

Salah satunya yaitu Petrus (pembunuhan misterius), merupakan salah satu modus kejahatan kemanusiaan negara yang sangat terkenal pada masa Orde Baru, metode petrus ini merupakan salah satu bentuk operasi militer TNI di Aceh pada masa awal DOM yang di kenal sebagai *shock therapy* yang ditujukan untuk menciptakan rasa takut pada masyarakat dan menarik dukungan mereka terhadap GAM.

Tiga wilayah yang bergolak, yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur yang merupakan wilayah yang paling menderita akibat kekerasan militer dan pelanggaran HAM. Kekerasan oleh TNI/ ABRI ini semakin memperumit permasalahan dan memicu kemarahan rakyat Aceh, ketidakmampuan aparat keamanan untuk membedakan antara rakyat biasa, GPK, dan GAM dan tindakan yang sewenang-wenang, tanpa memperhatikan prosedur hukum dan perundang-undangan menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Aceh.<sup>41</sup>

Pada periode DOM memang betul-betul merupakan pengalaman paling buruk yang dialami oleh rakyat Aceh, mereka mengalami tindak kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh militer.<sup>42</sup> Selama Aceh di jadikan Daerah Operasi Militer, ada dua pos satuan taktis yang paling terkenal sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kuburan massal, yaitu *Rumoh Geudong* di Pidie dan *Rancong* di Aceh Utara.<sup>43</sup>

Akibat DOM tersebut, ribuan anak menjadi yatim piatu, banyak rumah rusak atau dibakar, banyak istri yang menjadi janda, banyak orang cacat karena penganiayaan, dan korban jiwa pun sulit untuk di perkirakan jumlah pastinya. Di perkirakan jumlahnya mencapai 3800 sampai 35.000 jiwa. DOM juga menyebabkan pula perekonomian Aceh mengalami stagnasi, sehingga kondisi kehidupan rakyat Aceh sangat memprihatinkan.<sup>44</sup> Dalam perkembangannya, para korban baik laki-

<sup>39</sup>Kristen E. Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of A Separatist Organizations*, h. 4.

<sup>40</sup>Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, h. 25.

<sup>41</sup>Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, h. 26.

<sup>42</sup>Riza Sihbudi, dkk., *Bara dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*, h. 39.

<sup>43</sup>Otto Syamsudin Ishak, *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*, h. 15.

<sup>44</sup>Gazali Abbas Adan, *Win Win Solution dalam Musni Umar* (ed), h. 4.

laki maupun perempuan, mereka generasi yang sudah tidak mempunyai harapan besar terhadap NKRI akibat tindak kekerasan, kemudian mereka bergabung dengan GAM. Hal ini terlihat dari adanya pasukan Srikandi yang merupakan pasukan perempuan GAM korban-korban DOM baik korban perkosaan maupun janda.<sup>45</sup>

### Jumlah Kasus Selama Masa DOM di Aceh

| o | Jenis Kasus        | Jumlah             |
|---|--------------------|--------------------|
|   | Tewas/<br>Terbunuh | 1.<br>321<br>Kasus |
|   | Hilang             | 1.<br>958<br>Kasus |
|   | Perkosaan          | 3.<br>430<br>Kasus |
|   | Perkosaan          | 1<br>28 Kasus      |
|   | Pembunuhan         | 5<br>97 Kasus      |

*Sumber: Forum Peduli HAM Aceh, 1999*

Rakyat Aceh yang tidak lagi percaya kepada pemerintahan pusat, karena adanya upaya untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara sungguh-sungguh dan banyak yang lebih berpihak kepada GAM. Meskipun pada tahun 1991 Pemerintah telah berhasil menekan gerakan separatis ini, namun puncak kepemimpinan yang ada di luar negeri telah menjamin keberlangsungan gerakan ini.<sup>46</sup>

Kesalahan pemerintah dalam membuat kebijakan yang penuh dengan

kekerasan pada masa DOM dan tidak ditanganinya dengan baik tuntutan rasa keadilan masyarakat Aceh terhadap HAM setelah jatuhnya pemerintahan presiden Soeharto pada tahun 1998, kemudian status DOM di Aceh di cabut pada tanggal 8 Agustus 1998 terlebih lagi para masyarakat Aceh yang telah menjadi korban atas penerapan status operasi militer. Tentunya dengan harapan bahwa berbagai kejadian tindak kekerasan yang pernah menimpa mereka atau keluarganya tidak terulang lagi dan mereka dapat kembali menjalani hidup yang normal.<sup>47</sup> Kebijakan pemerintah RI saat itu juga diikuti dengan penarikan sejumlah pasukan non organik dari Aceh di sertai pernyataan Panglima ABRI / Menteri Pertahanan dan Keamanan, TNI Jenderal Wiranto di Masjid Baiturrahman Lhokseumawe pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Pada saat DOM di cabut bertepatan dengan bergulirnya reformasi di Indonesia.<sup>48</sup>

Pasca 1998 menandai fase ketiga. Dalam fase ini, negara masih tetap menggunakan kekerasan, negara dalam menghadapi GAM maupun rakyat Aceh yang di dalam dirinya sudah mulai tumbuh semangat nasionalisme ke-Acehan, dimana popularitas GAM di mata rakyat Aceh meningkat, karena hampir semua keluarga di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur menderita akibat DOM dan akhirnya Status DOM di cabut. Hal ini terbukti karena bahwa selama masa DOM berlangsung, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran di Aceh.<sup>49</sup> Gerakan di Aceh pasca DOM di motori oleh mahasiswa dengan salah satu agendanya yaitu menuntut kemerdekaan. Tuntutan merdeka yang mereka ajukan ini sebenarnya hanya sebagai strategi agar

<sup>45</sup>*Aceh Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, (Jakarta: Kontras, 2006), h. 70.

<sup>46</sup>Riza Sihbudi, dkk., *Bara dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*, h. 42.

<sup>47</sup>*Aceh Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, h. 71.

<sup>48</sup>*Ibid*

<sup>49</sup>Otto Syamsudin Ishak, *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*, h. 64.

pemerintahan pusat lebih memperhatikan mereka, karena tuntutan mereka yang sebenarnya adalah pengadilan atas korban-korban DOM. Karena tuntutan mereka tidak direspon dengan baik oleh pemerintahan pusat, maka gerakan ini semakin meluas.<sup>50</sup>

Berkenaan dengan hal ini, secara faktual ada tiga macam aspirasi yang hidup dalam masyarakat Aceh yaitu : (1) merdeka, yakni lepas dari negara Indonesia dan mendirikan negara Aceh yang berdaulat lazimnya seperti negara-negara lain, (2) referendum, yakni rakyat Aceh secara demokratis di beri pilihan, merdeka atau tetap bagian dan hidup dalam Negara Indonesia, (3) otonomi khusus, yakni rakyat Aceh di berikan hak seluas-luasnya dan sesuai dengan kehendak mereka mengatur dan mengurus dirinya, mengeksploitasi dan mengolah sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka dan siapapun yang tinggal dan hidup di Aceh. Dari ketiga aspirasi tersebut yang paling menonjol dan transparan wujudnya adalah merdeka yang di perjuangkan oleh GAM dan referendum yang di perjuangkan oleh kelompok sipil dengan lokomotifnya adalah aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).<sup>51</sup>

### **Faktor Penyebab Konflik Vertikal di Aceh**

Konflik Aceh merupakan salah satu konflik laten yang tunasnya telah tumbuh sejak masa-masa awal kemerdekaan dengan berbagai faktor penyebabnya. Konflik Aceh telah terjadi

beberapa kali sepanjang sejarah, dari masa ke masa, konflik yang terjadi di Aceh berbeda dengan latar belakang penyebabnya. Sesungguhnya faktor yang melatar belakangi rakyat Aceh bergerak adalah karena mereka merasa posisinya terancam, baik dalam sektor ekonomi maupun politik, sebagai akibat kebijakan sentralistik pemerintah RI.<sup>52</sup>

Mencermati konflik di Aceh, mengharuskan pemerintah untuk memilah lebih jeli berbagai faktor yang melatarbelakanginya, agar di temukan suatu solusi yang tepat bagi penyelesaiannya. Ketidaksederhanaan konflik yang ada di Aceh menuntut kehati-hatian dan proses kesabaran untuk menanganinya. konflik Aceh tidak bisa di urai dan di selesaikan dalam waktu secara singkat. Pendekatan militer sebagaimana yang telah di terapkan sejak tahun 1970-an di Aceh hingga sekarang bukan merupakan jalan yang tepat bagi pemecahan konflik Aceh.<sup>53</sup>

Pemahaman tentang faktor-faktor penyebab munculnya konflik di Aceh akan mempermudah dalam upaya mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pada masa Orde Baru kebijakan pemerintah ditekankan pada pembangunan dengan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Aset-aset sumber daya alam di Aceh di eksploitasi dalam konteks pembangunan ini.<sup>54</sup>

Dalam bidang ekonomi, masalah eksploitasi ekonomi menjadi akar konflik yang patut dicermati. Aceh yang kaya akan sumber daya alam namun amat di sayangkan masyarakat Aceh tidak di libatkan dalam proses perencanaan,

<sup>50</sup>Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, h. 29.

<sup>51</sup>Daniel Dhakidae, *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik Aceh Jakarta Papua*, (Jakarta: YAPPIKA, 2001), h. 74. dan Gazali Abbas Adan, *Win Win Solution* dalam Musni Umar (ed), h. 5.

<sup>52</sup>Syamsul Hadi, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, h. 49-50.

<sup>53</sup>Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh : Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, h. 13.

<sup>54</sup>*Ibid*

pengolahan, dan distribusi hasil dan potensi sumber daya alam daerah mereka.<sup>55</sup> Secara struktural, sebagai contoh pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, pada tahun 1971, tepatnya di Lhoksumawe, ibukota Aceh Utara di temukan cadangan gas alam dalam jumlah yang cukup besar dan tahun 1974 mulai di bangun pabrik *Liquefied Natural Gas* (LNG). Kemudian sejak tahun 1977 sudah di pasarkan secara komersial dan menjadikan Aceh sebagai kawasan industri yang strategis. Namun kondisi fisik daerah yang ada di sekitar kawasan industri cenderung tidak berubah, dan keadaannya masih seperti daerah ini belum menjadi kawasan industri.<sup>56</sup>

Arti strategis tersebut bertambah dengan berdirinya beberapa perusahaan besar, antara lain PT. Pupuk Asean, Asean Aceh Fertilizer (AAF) yang berdiri pada tahun 1981. Pada tahun 1982 hingga tahun 1985 di bangun pula PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) serta pabrik kertas PT. Kertas Kraft Aceh (KAA) serta sebuah MNC, yakni Mobil Oil. Sejak itu Aceh mulai berkenalan dengan industri-industri besar. Wilayah Aceh Utara kemudian di kemas dalam satu wilayah industri yang di namakan Zona Industri Lhokseumawe (ZILS).<sup>57</sup>

Ekonomi Aceh Mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup baik. Namun amat di sayangkan, tingkat pertumbuhan yang cukup fantastik itu tidak memberikan pengaruh yang positif bagi kesejahteraan penduduk setempat bahkan kehidupan masyarakat yang hidup di kawasan industri menunjukkan ketidakberdayaan penduduk setempat dalam beradaptasi

dengan lingkungan yang berubah begitu cepat.<sup>58</sup>

Industrialisasi ini, memberikan denyut kekayaan ekonomi yang luar biasa terutama dari migas, pada 1984. Namun demikian, hadirnya wilayah industri ini, bukanlah tanpa meninggalkan masalah seperti:

Ketidakpuasan dalam hal ganti rugi tanah yang di gunakan dalam membangun industri. (1). Sebagian masyarakat di takut-takuti dan diteror untuk menyerahkan tanah dan menggunakan pihak militer dalam aksi-aksi teror dan kekerasan baik fisik maupun nonfisik (2). Penduduk asli Aceh yang sudah tergusur tanahnya di tempatkan di lokasi-lokasi penampungan yang jauh dari desa asal mereka dan jauh dari mata pencaharian mereka semula (3).

Eksplorasi Pusat dan Daerah, salah satu masalah lainnya pemicu keinginan rakyat Aceh ingin merdeka adalah adanya indikasi eksploitasi pemerintahan pusat atas kekayaan alam Aceh yang terlalu besar (4). Fakta bahwa suku bangsa Aceh menempati 2/3 wilayah Nanggroe Aceh Darussalam hampir menyeluruh di kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, sebagian Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat. (5)<sup>59</sup>

Faktor ekonomi inilah yang berwujud adanya ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat terutama di kalangan elite Aceh. Karena Sistem sentarlistik Orde Baru telah membuat posisi tawar-menawar yang lemah bagi daerah dan memberikan alokasi sumber-sumber kekuasaan yang terlalu besar ke pusat dan tidak menempatkan daerah dalam posisi yang sejajar dalam sistem politik. Aceh hanya

<sup>55</sup>Tim Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion 1989-1992*, h. 1.

<sup>56</sup>Syamsul Hadi, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, h. 50.

<sup>57</sup>Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, h. 52.

<sup>58</sup>Syamsul Hadi, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, h. 50.

<sup>59</sup>*Tempo*, 30 Juni 1990.

menjadi subordinat dari pusat yang melayani kepentingan pusat saja, dan akibatnya menimbulkan eksploitasi secara sistemik, yaitu eksploitasi politik dan ekonomi. Aceh tidak diberikan tempat yang seharusnya, apalagi dalam penerapan keistimewaan itu tidak di berikan oleh pemerintah pusat.<sup>60</sup>

Dalam menghadapi suasana politik rakyat yang menyebabkan elite penguasa dan serdadu teralienasi (terasingkan), maka elite penguasa mengkambinghitamkan setiap organisasi perjuangan sebagai *common enemy*. Kebijakan politik pada masa Orde Baru sangat militer-politik kekerasan adalah politik menjaga stabilitas keamanan negara. Sebenarnya hal yang paling mendasar di dalam penetapan Aceh sebagai daerah perang, dengan status darurat militer adalah pengambil alihan kekuasaan dari penguasa sipil ke penguasa militer. Hal inilah yang menjadi sumber konflik internal. Hirarki kekuasaan yang militeristik tersebut terkomando dari pemerintahan pusat. Struktur pemerintahan sepenuhnya di dominasi oleh militer.<sup>61</sup>

### **Dampak Konflik Vertikal di Aceh Terhadap Kondisi sosialnya**

Konflik kekerasan yang berkepanjangan selama hampir tiga puluh tahun ini telah menghancurkan seluruh sendi kehidupan masyarakat Aceh. Yang mengakibatkan puluhan ribu orang menjadi korban kekerasan, hancurnya dunia pendidikan, hilangnya kesempatan kerja, aktivitas ekonomi rakyat tidak berjalan dan rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini yang terjadi pada hakikatnya telah menimbulkan luka psikologis yang di derita oleh rakyat Aceh,

baik sebagai individu, kelompok, maupun sebagai komunitas dari suatu wilayah yang secara geo-etnopolitik dikenal oleh Aceh atau Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>62</sup>

Dampak konflik Aceh masih terasa sampai sekarang. Dampak langsung yang dapat kita saksikan pada ratusan bahkan ribuan korban konflik terutama bagi anak-anak, perempuan, dan para janda yang berada di barak-barak pengungsian yang menderita fisik maupun psikis. Dampak langsung juga dapat kita lihat Fenomena aktor konflik yang pernah terlibat perang. Dampak tak langsung dari konflik adalah akibat yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata dalam mewujudkan berbagai bentuk gejala sosial. Tekanan yang dihadapi oleh korban konflik di Aceh bertambah dengan bencana tsunami tahun 2004 lalu.<sup>63</sup>

Masalah yang semakin menumpuk dari persoalan kebutuhan dasar, pendidikan hingga psikologis. Jangankan untuk pemulihan psikologis, ekonomi saja mereka tidak mendapatkan apa-apa. Muncul ironi, Musibah tsunami mendatangkan rahmat bagi orang rakyat Aceh. Program rehabilitasi Aceh sekarang tampaknya tidak sungguh-sungguh diarahkan untuk menjamin bahwa para korban tersebut memperoleh prioritas pemberdayaan dari proyek-proyek rehabilitasi. Banyak kontraktor yang tidak mau memakai sumber daya lokal dengan alasan di samping harus bayar mahal, juga alasan kualitas kerjanya kurang bagus.<sup>64</sup>

Munculnya NGO atau LSM internasional pasca tsunami telah ikut membawa kompleksitas tersendiri bagi proses-proses pembangunan

<sup>60</sup> Riza Sihbudi, dkk., *Bara dalam Sekam : Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*, h. 56.

<sup>61</sup> Otto Syamsudin Ishak, *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*, h. 79.

<sup>62</sup>Thung Ju Lan, dkk., *penyelesaian konflik di Aceh: Aceh dalam proses rekonstruksi dan rekonsiliasi*, (Jakarta : Riset Kompetitif Pembangunan Iptek Sub Program Ottonomi Daerah Konflik dan Daya Saing LIPI, 2005), h. 181.

<sup>63</sup>*Tsunami dan Bakti Taruna*, (Jakarta: Akademi TNI Cilangkap, 2005), h. 17.

<sup>64</sup>*Ibid*

perdamaian berkelanjutan di Aceh. Masyarakat korban konflik ataupun korban tsunami makin terbiasa dengan bantuan dan *Charity*. Akibatnya, tawarantawaran pemberdayaan yang tidak menyertakan bantuan material cenderung diabaikan. Namun, kurangnya konsolidasi antara LSM pendampingan korban pengungsi terhadap konstruk mental ini akan menjadi kendala tersendiri untuk membangun kemandirian korban pengungsi untuk kembali hidup normal di tengah-tengah masyarakat.<sup>65</sup>

Dampak konflik ini tentu membawa kerugian besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, dan memiliki dampak yang serius terhadap masalah kemanusiaan dan mendapat perhatian internasional. Konflik yang terjadi jelas berdampak pada kerugian yang dialami masyarakat di berbagai bidang kehidupan, oleh karena itu sudah seharusnya konflik harus segera di akhiri dengan berbagai pendekatan tanpa harus dengan tanpa kekerasan.<sup>66</sup>

### **Rekonsiliasi Konflik Vertikal Di Aceh**

#### **Upaya Penyelesaian Konflik Aceh dengan Pemerintahan Pusat**

Dalam kerangka penyelesaian masalah Aceh, pemerintah pusat seringkali melakukan kebijakan militeristik yang represif, ini membuat rakyat Aceh sangat menderita, mereka hidup dalam kemiskinan, kebingungan, ketakutan, merasa tertekan dalam berbagai aspek, namun pemerintah pusat kembali menggelar operasi-operasi militer setelah dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) pada masa pemerintahan Presiden

B.J. Habibie yaitu pada tanggal 8 Agustus 1998.<sup>67</sup>

Langkah-langkah pemerintahan Presiden Habibie dalam penyelesaian konflik Aceh, sebenarnya sudah mencoba untuk lebih mengedepankan pendekatan keamanan dengan menggunakan militer dan polisi dalam menjaga keamanan di Aceh. Kemungkinan besar karena meski secara formal Habibie ditunjuk sebagai presiden baru, namun beliau tidak memiliki kontrol penuh atas polisi dan militer, yang kala itu secara personal berada di tangan Jenderal Wiranto. Akan tetapi, pendekatan tersebut dilaksanakan setengah hati. Maka menambah kecewa masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat.<sup>68</sup>

Angin segar baru berhembus pada awal 2000, ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid diharapkan adanya langkah-langkah pemerintah yang berorientasi kepada penyelesaian konflik Aceh, Presiden Abdurrahman Wahid mencoba melakukan pendekatan baru, yang disebut dengan pendekatan ekonomi dan politik, dan mencoba membuka dialog damai dengan GAM.<sup>69</sup>

Pada tanggal 30 Januari 2000 Presiden Abdurrahman Wahid meminta kesediaan *Henry Dunant Center for Humanitarian* (HDC) untuk berperan sebagai penengah dalam proses perundingan atau untuk memfasilitasi dialog kemanusiaan guna menyelesaikan konflik Aceh. Ketika berpidato di HDC pada tanggal 30 Januari 2000, Abdurrahman Wahid menekankan pada peran dialog kemanusiaan dalam

<sup>65</sup>Syamsul Hadi, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, h. 55.

<sup>66</sup>Syamsul Hadi, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, h. 56.

<sup>67</sup>Riza Sihbudi, dkk., *Bara dalam Sekam :Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*, h. 189.

<sup>68</sup>Daniel Dhakidae, *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik Aceh Jakarta Papua*, h.39.

<sup>69</sup>*Tsunami dan Bakti Taruna*, (Jakarta: Akademi TNI Cilangkap, 2005), h.17.

mengubah situasi konflik yang pada umumnya didasarkan pada ideologi. Permintaan ini kemudian ditanggapi positif oleh HDC. Aksi pertama yang dilakukan HDC adalah membawa RI-GAM secara bersama-sama ke meja perundingan pada bulan Januari 2000 yang kemudian disusul dengan serangkaian dialog yang dihadiri kedua belah pihak.<sup>70</sup>

Meskipun tidak memiliki kepercayaan terhadap Pemerintah Indonesia, GAM segera menerima tawaran dialog dengan tujuan menginternasionalisasi kasus Aceh dan mendapatkan dukungan atau simpati dari Amerika atau negara-negara Eropa dengan harapan mereka mau menekan Indonesia agar melepaskan Aceh. GAM juga berharap dialog ini dapat mengekspos seluruh kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukan TNI terhadap warga Aceh. Perundingan tersebut menghasilkan *Joint Understanding of Humanitarian Pause for Aceh* yang di tanda tangani pada tanggal 12 Mei 2000, kedua pihak yang bertikai melalui mediasi *Henry Dunant Centre* (HDC) menandatangani *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh* "Jeda Kemanusiaan".<sup>71</sup>

Langkah ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau gerbang menuju penyelesaian konflik yang sebenarnya. Dengan tujuan untuk (1) Mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Aceh akibat konflik melalui Komite Bersama Kemanusiaan, (2) Menyediakan bantuan keamanan guna mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan dan untuk mengurangi ketegangan serta kekerasan yang dapat menyebabkan penderitaan selanjutnya melalui Komite Bersama Bantuan Keamanan; dan (3)

Meningkatkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan untuk mendapatkan solusi damai terhadap situasi konflik di Aceh (*trust building*).<sup>72</sup>

Kekerasan terus terjadi di Aceh, jeda kemanusiaan tetap yang berlaku 2 Juni 2000 dan berakhir pada 15 Januari 2001. Kemudian untuk mendukung jeda kemanusiaan tersebut di bentuklah badan-badan pendukung seperti Komite bersama Aksi Kemanusiaan, dan Tim Monitoring Modalitas keamanan. Namun amat di sayangkan kekerasan masih terjadi di lapangan. Jeda tersebut digantikan melalui Kesepakatan Dialog Jalan Damai pada tanggal 18 Maret 2001, Pemerintah Indonesia dan GAM menyepakati satu zona aman (*peace zone*) di Aceh, yang meliputi kabupaten Aceh Utara dan Bireuen, namun juga tidak menghasilkan kemajuan yang berarti.<sup>73</sup>

Kendati HDC dianggap gagal, lembaga tersebut setidaknya memberikan pengalaman bahwa dialog dan pertemuan untuk membahas konflik yang mengakar di Aceh bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Setidaknya HDC telah mampu membawa kedua belah pihak yang bersengketa untuk mau berdialog dan membangun rasa saling percaya.<sup>74</sup> Poin keberhasilan HDC terletak pada kemampuannya mencairkan kebekuan antara pihak yang bertikai, membatasi dan memperlunak perbedaan pandangan tajam kedua belah pihak antara pemerintah dengan GAM sehingga Jeda Kemanusiaan diperpanjang. Berbagai kegagalan yang mungkin pernah dilakukan HDC merupakan pelajaran berharga yang bisa

<sup>70</sup>Koflik *Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), h. 128.

<sup>71</sup>Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh : Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, h. 57.

<sup>72</sup>Syamsul Hadi, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, h. 57.

<sup>73</sup>Kompas, 10 Desember 2002, h.1.

<sup>74</sup>Syamsul Hadi, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, h. 58.

diantisipasi oleh aktor resolusi konflik berikutnya.<sup>75</sup>

Pemerintah kemudian mengambil beberapa kebijakan yang bersifat persuasif kepada rakyat Aceh, maka di keluarkanlah beberapa Inpres, pada 11 April 2001, diumumkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2001 mengenai langkah-langkah komprehensif penyelesaian konflik Aceh yang mencakup enam bidang yaitu: Politik, ekonomi, sosial, hukum, ketertiban manusia, keamanan, pendidikan, dan media informasi dan komunikasi.<sup>76</sup>

Pada 23 Juli 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri yang menggantikan Abdurrahman Wahid dengan prioritas utamanya mempertahankan kesatuan Negara. pada masa pemerintahan Presiden Megawati ini sudah diberlakukan undang-undang No. 18 tahun 2001 mengenai Status Otonomi Khusus. Dengan berlakunya undang-undang tersebut Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Undang-undang tersebut mengatur antara lain pembagian pendapatan antara pusat dan daerah yaitu 30 dan 70%, pelaksanaan syari'at Islam dengan di bentuknya Mahkamah Syariah dan pemilihan gubernur NAD secara langsung. Dengan adanya Undang-undang No 18 tahun 2001 mengenai Status Otonomi Khusus memberikan beberapa implikasi yang cukup penting, di antaranya penetapan undang-undang tersebut merefleksikan pergeseran inisiatif legislatif dari birokrat pusat kepada parlemen dan provinsi sehingga bukan saja pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, akan tetapi dari birokrat ke parlemen. Implikasi dari keduanya adalah diambilnya strategi yang berbeda oleh

pemerintah pusat terhadap konflik di Aceh.<sup>77</sup>

Penyelesaian konflik Aceh tidak bisa di lakukan dengan cara membiarkan melakukan dialog politik dengan pemerintah. Untuk mengakhiri pemberontakan di tubuh orang Aceh hanya ada satu jalan, yakni operasi terpadu. Berlakunya kesepakatan Penghentian Kekerasan *Cessation on Hostilities Agreement* (CoHA) yang ditandatangani di Jenewa pada 9 Desember 2002. Namun lagi-lagi jalan buntu menghadang kedua belah pihak. Sementara pemerintah tengah mengkaji tiga alternatif kebijakan yang akan di terapkan di Nanggroe Aceh Darussalam, keluarlah Keputusan Presiden No.18 tahun 2003 yang diumumkan pada 19 Mei 2003 untuk menerapkan status darurat militer di Aceh.<sup>78</sup>

Tiga alternatif tersebut adalah keadaan darurat militer dilanjutkan, keadaan darurat militer diturunkan menjadi darurat sipil atau darurat militer yang hanya di terapkan di wilayah rawan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tiga alternatif kebijakan tersebut, maka dilanjutkan kepada di berlakukannya status darurat sipil atas keputusan Presiden Megawati Soekarno Putri selama enam bulan, terhitung mulai tanggal 19 Mei 2004, untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>79</sup>

Hal ini diterapkan dalam keputusan Presiden Megawati kepada pers di Istana Negara Jakarta, Selasa 18 Mei malam, dengan status darurat sipil, penguasa sipil daerah di pegang gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh.<sup>80</sup> Sebagaimana kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya, upaya-upaya

<sup>75</sup>Tsunami dan Bakti Taruna, h.19.

<sup>76</sup>Syamsul Hadi, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru : Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, h. 59.

<sup>77</sup>Tsunami dan Bakti Taruna, h.19.

<sup>78</sup>"Aceh : Solusi Militer atau Politik", *Republika*, Selasa 16 Agustus 2003, h. 5.

<sup>79</sup>"Tiga Alternatif Penanganan Aceh", *Kompas*, 16 Mei 2003, h. 8.

<sup>80</sup>"Presiden Tetapkan Darurat Sipil Nanggroe Aceh Darussalam", *Kompas*, Rabu, 19 Mei 2004, h. 1.

pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri tidak akan secara otomatis dapat meredakan kekerasan dan ketegangan yang di rasakan masyarakat Aceh. Sebuah harga yang harus dibayar Megawati atas kemesraannya dengan militer pasca jatuhnya Abdurrahman Wahid. Akibatnya bisa ditebak, sejarah berulang, kekerasan demi kekerasan terus berlangsung di Serambi Mekah.<sup>81</sup>

Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) dan Jusuf Kalla sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada Kabinet Gotong Royong Megawati, tampak keduanya memilih cara non-militer untuk menyelesaikan persoalan. Terlebih inisiatif, Jusuf Kalla dengan cara bekerja di balik layar (*second track diplomacy*) agar dapat masuk ke pusat pimpinan GAM, dalam rangka melakukan komunikasi politik di satu sisi dan sekaligus membangun kepercayaan. Peran yang menentukan ini dijalankan oleh orang-orang kepercayaan Jusuf Kalla, terutama Farid Husein yang mampu membangun *trust building* dengan keseluruhan, GAM sampai ke pucuk pimpinannya.<sup>82</sup>

Kebersamaan SBY-JK yang memenangi pemilu 2004, menyebabkan *second track diplomacy* yang telah dijalani bisa dilanjutkan pada masa pemerintahan mereka. Upaya-upaya penyelesaian konflik Aceh sudah cukup serius dan maksimal dilakukan oleh SBY-JK. Upaya tersebut berangkat dari hati nurani dan pikiran jernih serta solidaritas kemanusiaan, di mana rakyat Aceh sudah cukup lama terlibat konflik yang mengakibatkan timbulnya kerugian jiwa

dan harta benda yang tidak sedikit.<sup>83</sup> Menurut rakyat Aceh konflik tersebut telah mencabik-cabik rasa aman masyarakat dan akhirnya menghambat upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Musibah yang mendatangkan berkah akhirnya terjadi, tsunami 26 Desember 2004 telah turut mengambil peran untuk mendamaikan para pihak yang bertikai dan juga mempercepat dorongan bagi pemerintah RI guna mengakhiri derita fisik dan psikis rakyat Aceh.<sup>84</sup>

Pada sisi lain Gerakan Aceh Merdeka sebagai gerakan yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat, juga memiliki keinginan untuk menyelesaikan konflik Aceh. Musibah tersebut menuntut Pemerintah dan GAM untuk lebih memikirkan solusi damai dalam menyelesaikan pemberontakan bersenjata di Aceh. Mempertemukan keinginan Pemerintah RI dan GAM dalam rangka menyelesaikan konflik Aceh tentu tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karenanya kearifan dan kerendahan hati para pemimpin sebagaimana yang ditunjukkan oleh Muhammad Jusuf Kalla menjadi penting dan menentukan bagi terwujudnya proses perdamaian di Aceh.<sup>85</sup>

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan GAM mulai menemukan titik temunya. Pembicaraan damai di Aceh kembali dilanjutkan Kesabaran para negosiator dari kedua belah pihak dalam melakukan pembicaraan-pembicaraan turut menjadi faktor mempercepat perdamaian di Aceh. Presiden SBY memilih penyelesaian secara damai untuk masalah Aceh,

<sup>81</sup>Ibid

<sup>82</sup>Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, (Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar: 2008), h. 60.

<sup>83</sup>Ibid

<sup>84</sup>Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, (Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar: 2008), h. 61

<sup>85</sup>Ibid

mengandalkan apa yang di sebutnya sebagai *soft power*.<sup>86</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa kunjungan Jusuf Kalla ke Helsinki untuk bertemu dengan Mr. Martti Ahtisaari dan beberapa tokoh GAM Swedia seperti Zaini Abdullah, Malik Mahmud Al Haytar dan Bachtiar Juli menjadi perlambang kerendahan hati seorang pemimpin nasional Indonesia dalam upaya mengakhiri konflik di Tanah Rencong secara komprehensif pasca penandatanganan kesepakatan damai. Kerendahan hati merupakan strategi yang dapat meluluhkan hati para petinggi GAM untuk akhirnya sama-sama bersepakat menghentikan konflik yang sangat merugikan Indonesia, utamanya rakyat Aceh.<sup>87</sup>

Pertemuan demi pertemuan yang di fasilitasi oleh pihak ketiga yaitu *Crisis Management Initiative (CMI)* yang bemarkas di Helsinki, Finlandia. Lembaga yang di pimpin oleh mantan Presiden Helsinki, Martti Ahtisaari mulai ada sedikit sikap yang melunak dari pihak GAM, dan atas prakarsa CMI lahir sebuah Nota Kesepahaman di Helsinki. Puncaknya adalah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia melalui mediator Martti Ahtisaari dalam kapasitas sebagai *Chairman, Crisis Management Initiative (CMI)*. Sedangkan kedua belah pihak yang di wakili oleh Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan HAM) dari pihak RI sedangkan GAM di wakili oleh Zaini Abdullah (Menteri Luar Negri GAM).<sup>88</sup>

Dalam MoU Helsinki disebutkan bahwa Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah RI sesuai dengan konstitusi. Disepakati pula untuk membentuk partai-partai lokal yang berbasis di Aceh. Menyangkut dasar MoU dinyatakan bahwa substansi Nota kesepahaman yang di capai ada tiga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konstitusi RI dan kepastian GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan.<sup>89</sup>

Berlandaskan kepada Nota Kesepahaman Helsinki dan untuk mengimplementasikan cita-cita perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam perlu di lakukan berbagai upaya oleh para pihak dengan niat yang baik dan tulus. Sehingga program rekonsiliasi anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kedalam kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam yang berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak.<sup>90</sup>

### **Proses Perundingan Helsinki dan Kesepakatan Damai**

Secara keseluruhan perundingan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM pasca bencana tsunami berlangsung selama lima putaran, putaran pertama diadakan pada 27-29 Januari 2005, putaran kedua pada 21-23 Februari 2005, putaran ketiga 12-16 April 2005, keempat 26-31 Mei 2005, dan kelima 12-17 Juni 2005, pihak GAM dan pemerintah memulai

<sup>86</sup>Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, h. 64.

<sup>87</sup>*Ibid*

<sup>88</sup>Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus*

*Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, h. 65

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>90</sup>*Ibid*

tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia.<sup>91</sup>

Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama *Aceh Monitoring Mission* (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan Thailand dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa yaitu Swiss dan Norwegia. Tugas utama AMM adalah menyelidiki dan pengambilan keputusan terhadap tuduhan pelanggaran MoU dan membangun kerjasama di antara dua pihak. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.<sup>92</sup>

Dalam laporan *International Crisis Group Indonesia* (ICGI), sebuah lembaga independen dalam usaha pencegahan konflik di seluruh dunia, menyebutkan ada tiga faktor utama bergulirnya perundingan-perundingan tersebut.<sup>93</sup> Ketiga faktor tersebut adalah inisiatif dari Yusuf Kalla yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden pada tahun 2004-2009, dampak operasi militer terhadap GAM, dan perubahan dinamika konflik sebagai akibat dari bencana tsunami Yusuf Kalla bersama dengan para penasehatnya, yaitu Menteri Kehakiman dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, dan Mayor Jendral Syarifudin Tipe telah

merencanakan perundingan damai tidak lama setelah terpilih menjadi wakil presiden. Berbagai perundingan dan pendekatan dilakukan oleh tim ini terhadap para pemimpin GAM baik yang berada di Malaysia, maupun Finlandia.<sup>94</sup>

Kelima putaran perundingan Helsinki di atas menghasilkan nota kesepahaman bersama (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Adapun pokok-pokok besar dalam MoU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Aceh
  - a. Pemerintahan Aceh akan di atur dengan Undang-Undang baru yang di perkenalkan 31 Maret 2006.
  - b. Aceh akan memiliki hak untuk menggunakan symbol daerah seperti bendera, lambang dan himne.
2. Partisipasi Politik
  - a. Pemerintah Indonesia memfasilitasi pendirian partai politik berbasis Aceh dalam satu tahun setelah penandatanganan MoU.
  - b. Masyarakat Aceh memiliki untuk ikut berpartisipasi sebagai kandidat dalam pemilihan daerah di Aceh pada April 2006 dan seterusnya.
3. Ekonomi
  - a. Aceh mempunyai hak untuk mencari dana pinjaman luar negeri, menetapkan tingkat suku bunga yang berbeda dengan yang di tetapkan Bank Indonesia.
  - b. Aceh akan memperoleh 70% pendapatan dari kekayaan sumber alamnya.
4. Amnesti dan Intergrasi
  - a. Amnesti akan di berikan kepada anggota GAM dan tahanan politik dalam dua minggu setelah penandatanganan kesepakatan.
  - b. Pemerintah akan memfasilitasi integrasi para anggota GAM kedalam masyarakat.
  - c. Seluruh anggota GAM sebagai masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam polotik, ekonomi, dan sosial.

<sup>91</sup> *Aceh Kita*, Volume 2, Edisi 2, Mei - Agustus 2005.

<sup>92</sup> Syamsul Hadi, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, h. 86.

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 82.

<sup>94</sup> *Aceh Kita*, Volume 2, Edisi 2, Mei - Agustus 2005.

5. Hak Azasi Manusia
  - a. Pengadilan HAM dan komisi kepercayaan dan rekonsiliasi akan didirikan di Aceh.
6. Pengaturan Keamanan
  - a. Penghentian pertentangan sesuai dengan perjanjian.
  - b. Pemerintah Indonesia menarik militer non-organik dan kekuatan polisi dari Aceh sampai dengan akhir 2005.
  - c. Bersama dengan itu, GAM menyerahkan seluruh senjata dan membubarkan 3000 pasukan.
7. Pendirian *Aceh Monitoring Mission* (AMM)
  - a. AMM akan di bentuk oleh Uni Eropa (UE) dan lima Negara ASEAN. Jika terjadi perselisihan, AMM di beri kewenangan penuh untuk menyelesaikan. Jika tidak selesai, penyelesaian melibatkan ketua AMM dan ketua perwakilan kedua pihak. Bila itu juga tidak selesai, penyelesaian dibawa ke tingkat MENKOPOLHUKAM, pimpinan GAM, pimpinan CMI dan Pihak UE.<sup>95</sup>

Menyangkut dasar MoU dinyatakan bahwa substansi Nota Kesepahaman yang di capai ada tiga, yakni NKRI, konstitusi RI dan kepastian GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan.<sup>96</sup>

### C. Penutup

Dari hasil penelitian melalui literatur-literatur yang ada, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni mengenai Konflik Vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta sejak tahun 1976 sampai 2005,

yang memetakan kronologi sejarah terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka, serta menemukan latar belakang, dan faktor penyebab terjadinya konflik di Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa kemunculan konflik ini dapat di analisis bahwa sebenarnya terjadinya kesenjangan sosial yang sangat mencolok antara Pemerintahan Pusat dengan Daerah.

Konflik ini merupakan ketidakadilan selama puluhan tahun yang dirasakan rakyat Aceh terhadap pemerintahan pusat yang dirasa kurang memperhatikan kesejahteraan dan keadilan pembagian hasil sumber daya alam yang berhak dinikmati rakyat Aceh, serta tidak diakomodasikannya aspirasi rakyat Aceh untuk membentuk system pemerintahan wilayah Aceh berdasarkan keistimewaan identitas budaya dan etno-religiusnya dengan menerapkan syariat Islam, menimbulkan kekecewaan besar yang terefleksikan melalui gerakan separatis GAM. Kebijakan pemerintah orde baru yang militeristik dan mengedepankan kekerasan dengan operasi militer DOM, justru semakin membuat penderitaan rakyat Aceh menjadi berkepanjangan.

Instrumen diplomasi yang dikedepankan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Aceh dinilai sebagai langkah yang cukup tepat, namun perlu di perhatikan bahwa riwayat perundingan RI-GAM sering diwarnai kegagalan. Perundingan tidak pernah benar-benar memuaskan. Sejak tahun 2000 sudah beberapa perundingan yang di gelar, tetapi kemudian macet di tengah jalan. Sebut saja Jeda Kemanusiaan, Moratorium Permusuhan, Damai Melalui Dialog, dan terakhir yang cukup menjanjikan adalah CoHA. CoHA juga hanya efektif dua bulan setelah itu juga tidak dapat berjalan, dan berakhir dengan GAM menjadi penting terutama bila dikaitkan dengan upaya rekontruksi Aceh pasca bencana, meski pada pasca bencana pun, kontak

---

<sup>95</sup>AFB/ Litbang MI, di muat dalam Media Indonesia, Selasa 16 Agustus 2005.

<sup>96</sup>Menurut Hamid, tidak disebutkan UUD 1945 dalam MoU secara eksplisit hanya persoalan semantic, konstitusi RI artinya UUD 1945, karena hanya ada satu konstitusi RI. Di jelaskan pula bahwa materi MoU terutama diambil dari UU No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD dan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, *Harian Kompas*, Sabtu 24 Agustus 2005.

senjata antara TNI dan GAM masih berlangsung di Aceh.

Meskipun Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki cukup komprehensif, dan kemauan politik dari kedua belah pihak cukup kuat, namun tantangannya masih besar. Adapun pokok-pokok besar dalam MoU tersebut adalah sebagai berikut: Undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh, partisipasi politik, ekonomi, Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), Amnesty dan integrasi dalam masyarakat, Pengaturan keamanan, dan Pembentukan *Aceh Monitoring Mission (AMM)*.

MoU tersebut hanya menyebutkan penyelesaian dasar. Masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Implementasinya secara rinci juga belum jelas. Kesepakatan tersebut banyak melibatkan elite dari dua belah pihak, namun kurang melibatkan masyarakat sipil dan elemen masyarakat lainnya yang mewakili untuk berkontribusi. Ternyata masih terdapat kesenjangan besar antara pandangan di Jakarta, Helsinki dan Banda Aceh serta kenyataan di lapangan.

Penderitaan masyarakat Aceh pun berakhir pada tanggal 15 Agustus 2005. Dengan adanya Nota Kesepakatan damai (MoU) antara kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang hampir 30 tahun di Aceh. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman damai antara RI dengan GAM yang dilaksanakan di Helsinki. Berbagai harapan pun dari masyarakat di gantungkan pada perdamaian yang telah di capai untuk kesejahteraan hidup yang selama ini dirasakan warga dalam kondisi yang seba tidak kondusif. Dengan demikian, melihat fenomena Aceh, Indonesia sebagai bangsa dan negara yang besar hendaknya memiliki kesadaran bagaimana seharusnya menjalankan relasi kekuasaan dengan rakyatnya agar dapat memakai hak dan kewajiban negara terhadap rakyatnya.

## Daftar Pustaka

Adam, Asvi Warman. *Konflik dan Penyelesaian Aceh: Dari Masa ke Masa*” *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*, ed. M. Hamdan Basyar. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008.

Dhakidae, Daniel. *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik Aceh Jakarta Papua*, (Jakarta: YAPPIKA, 2001), h. 74. dan Gazali Abbas Adan, *Win Win Solution* dalam Musni Umar (ed), h. 5.

Hadi, Syamsul. dkk. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Ishak, Otto Syamsudin., *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2008.

Isre, Mohammad Soleh, ed. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003.

*Koflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003.

Lan, Thung Ju. dkk. *penyelesaian konflik di Aceh: Aceh dalam proses rekontruksi dan rekonsiliasi*. Jakarta : Riset Kompetitif Pembangunan Iptek Sub Program Ottonomi Daerah Konflik dan Daya Saing LIPI, 2005.

Nurhasim, Moch. dkk. *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta : LIPI, 2003.

Nurhasim, Moch. *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar: 2008.

Notosusanto, Nugroho. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI PRESS, 2006.

Sawitri, Isma. dkk. (Panitia Peduli Aceh), *Simak dan Selamatkan Aceh*, Jakarta : PT Bina Rena Perwira, 1998.

Schulze, Kristen E. *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of A Separatist Organizations*. East West Center: Wasington,2004.

Sihbudi, Riza. Dkk. *Bara dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*. Jakarta : Mizan, 2001.

Susan, Novri. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syamsuddin, Nazaruddin. *Pemberontakan Kaum Republik. Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

Syamsuddin, Nazaruddin. *Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*. Jakarta: UI Press, 1999.

Tim kell. *The Roots of Acehnese Rebellion 1989-1992*. New York: Cornell University Pers, 1995.

Tippe, Syarifuddin. *Aceh di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Cidencindo Pustaka, 2000.

*Tsunami dan Bakti Taruna*, (Jakarta: Akademi TNI Cilangkap, 2005)

Wiliam, Marsden. *History of Sumatra (Sejarah Sumatra), Pengantar John Bastin, Terjemah Tim Komunitas Bambu*. Jakarta : Komunitas Bambu, 2008.

*Aceh Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: Kontras, 2006.

*Aceh Kita*, Volume 2, Edisi 2, Mei - Agustus 2005.

*Editor*, No. 43/ Thn IV/ 13 Juli 1991.

*Kompas*, Sabtu 24 Agustus 2005.

*Kompas*, 10 Desember 2002

*Kompas*, 16 Desember 2002.

*Kompas*, 16 Mei 2003.

*Kompas*, 26 Agustus 2003.

*Kompas*, Rabu, 19 Mei 2004.

*Republika*, Selasa 16 Agustus 2002.

*The Price of Freedom the Unfinished diary of Teungku Hasan Tiro, National Liberation Front of Aceh Sumatra,1984*